



**REVISI  
RENCANA  
STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2017-2019**

**DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

**JL. S.M AMIN No. 92 Pekanbaru**

## KATA PENGANTAR

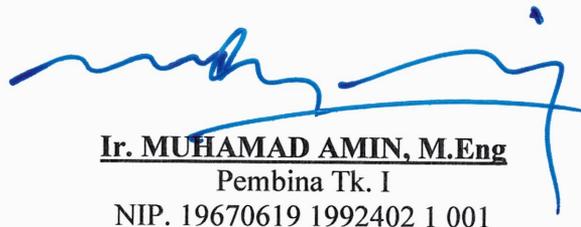
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 dapat disusun.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah jangka menengah Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan dokumen untuk periode 3 (Tiga) Tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019.

Kami sadar dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada periode berikutnya.

**Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**



**Ir. MUHAMAD AMIN, M.Eng**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670619 1992402 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.2.1. Sarana dan Prasarana .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD .....	38
3.3. Telaah Renstra pada Kementerian /Lembaga Terkait.....	41
3.3.1. Renstra Kementrian PUPR .....	44
3.3.2. Renstra Bidang Pertanahan .....	47
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	59
BAB VIII PENUTUP.....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang.....	15
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan .....	15
Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Struktural menurut Pendidikan .....	15
Tabel 2.4. Jumlah Pejabat Struktural menurut Jenis Kelamin .....	16
Tabel 2.5. Jumlah Fungsional Umum menurut Jenis Kelamin .....	16
Tabel 2.6. Jumlah Sasaran dan Prasarana .....	16
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau .....	18
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	23
Tabel 3.2. Kepemilikan Rumah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	26
Tabel 3.3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Riau .....	27
Tabel 3.4. Bencana Alam Banjir dan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Korban Tahun 2014 .....	28
Tabel 3.5. Rekapitulasi Kawasan Permukaan di Kawasan Strategis Provinsi Riau Berdasarkan Perubahan RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau.....	33
Tabel 3.6. Rekapitulasi Kecamatan Pada Kawasan Yang Cepat Tumbuh dan Berpeluang Menjadi Kawasan Kumuh Perkotaan .....	34
Tabel 3.7. Rekapitulasi Identifikasi Kawasan Kumuh Provinsi Riau .....	35
Tabel 3.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2017-2019 .....	40
Tabel 3.9. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	42
Tabel 3.10. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau .....	49
Tabel 3.11. Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	51
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau .....	51
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan .....	56
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencana .....	3
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau .....	11
Gambar 3.1 Kawasan Prioritas Permukiman Pusat Kota (Duri).....	29
Gambar 3.2 Kawasan Prioritas Permukiman Pusat Kota Dumai.....	30
Gambar 3.3 Arahan Struktur Ruang Wilayah Riau Tahun 2014-2030.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bagian pelaksanaan dari tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan Pembangunan Nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan

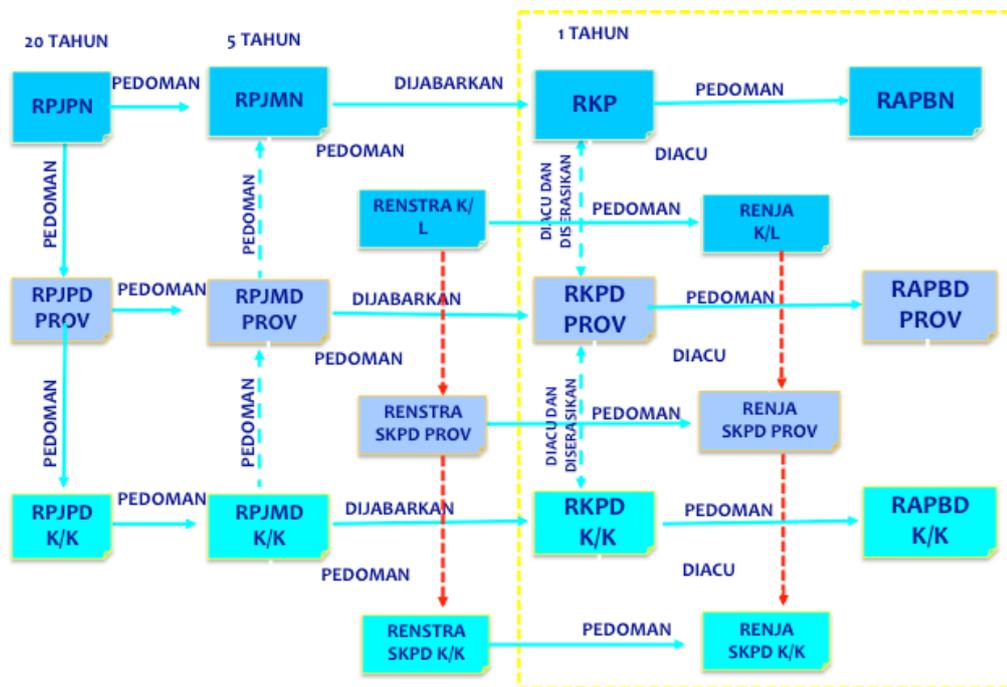
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki fungsi sebagai media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih, dan sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki Perangkat Daerah serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan juga merupakan bagian yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2017-2019 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Riau sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Sedangkan tujuan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
2. Merumuskan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan Provinsi Riau.
3. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur Riau ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015-2019.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2019.
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah**

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Sedangkan rincian tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, telah ditetapkan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah membantu Gubernur Riau melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengacu pada uraian tersebut, pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Perumahan dan Pertanahan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan

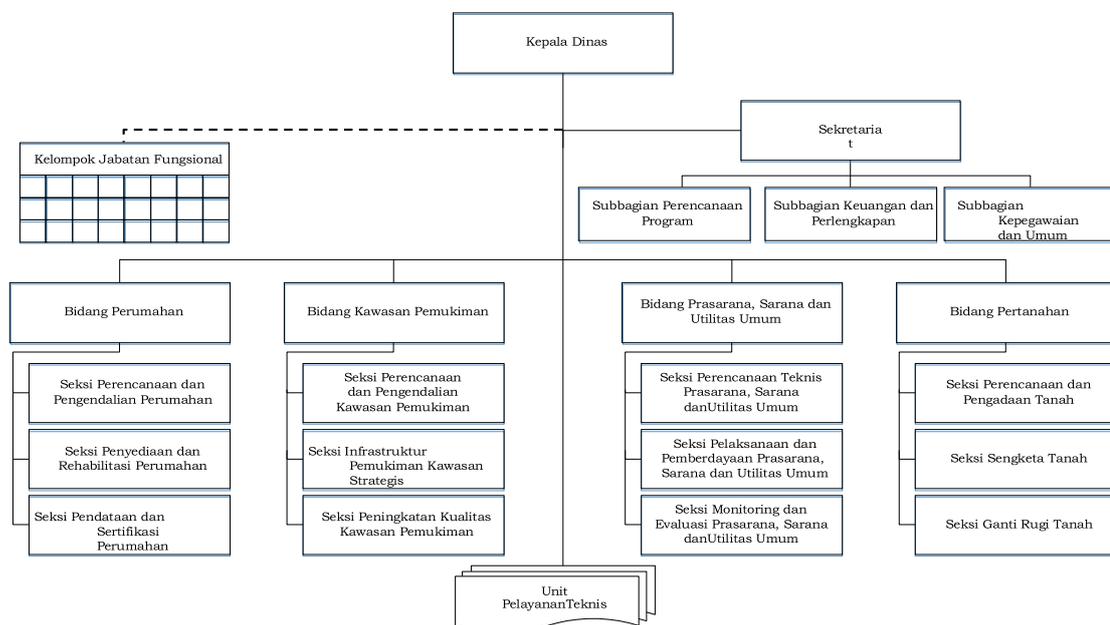
**penyelenggaraan Perumahan**, yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan. **Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**, yang dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman yang telah ada, pembangunan kawasan permukiman baru atau pembangunan kembali kawasan permukiman dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan : perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian. Adapun kategori yang terakhir yaitu **Penyelenggaraan Pertanahan** yang meliputi perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, inventarisasi tanah ulayat/adat, identifikasi dan fasilitasi sengketa tanah maupun ganti rugi tanah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan Program.
  - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang Perumahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan.
  - b. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan.
  - c. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Perumahan.
- 4) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
  - b. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis.
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- 5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  - b. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Umum.
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- 6) Bidang Pertanahan, terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah.
  - b. Seksi Sengketa Tanah.
  - c. Seksi Ganti Rugi Tanah.

Gambar 2.1  
Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Riau



Adapun Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Sebagai Berikut :

- 1) Kepala Dinas
  - a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2) Sekretaris :

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - d) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan dan Seksi Pendataan dan Sertifikasi Perumahan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perumahan;

- b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perumahan;
  - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Kawasan Permukiman
- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
    - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kawasan Permukiman;
    - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman;
    - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
    - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 5) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- a. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
  - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
  - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 6) Kepala Bidang Pertanahan
- a) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah, Seksi Sengketa Tanah dan Seksi Ganti Rugi Tanah;
  - b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum fungsi:
    - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pertanahan;
    - b) Penyelenggaraan pelaksanaan dan penganggaran koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pertanahan;
    - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
    - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 22. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebanyak 102 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	3
2	Pembina	IV/a	9
3	Penata Tingkat I	III/d	13
4	Penata	III/c	12
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	27
6	Penata Muda	III/a	14
7	Pengatur Tingkat I	II/d	3
8	Pengatur	II/c	11
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	6
10	Pengatur Muda	II/a	4
Jumlah			102

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2 (S2)-Magister	17	
2	Strata 1 (S1)-Sarjana	47	
3	Sarjana Muda (D III) -Diploma III	5	
4	SLTA/Sederajat	31	
5	SLTP	1	
6	SD	1	
Jumlah		102	

Tabel 2.3  
Jumlah Pejabat Struktural Menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2 (S2)-Magister	14	
2	Strata 1 (S1)-Sarjana	7	
3	Sarjana Muda (D III) -Diploma III		
4	SLTA/Sederajat		
Jumlah		21	

Tabel 2.4  
Jumlah Pejabat Struktural Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	17	
2	Perempuan	4	
Jumlah		21	

Tabel 2.5  
Jumlah Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	63	
2	Perempuan	18	
Jumlah		81	

## 2.2.1. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, memiliki beberapa sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Jumlah Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
1.	Gedung	6	Unit
2.	Kendaraan Roda 4	9	Unit
3.	Kendaraan Roda 2	10	Unit
4.	Mesin Fotocopy	3	Unit
5.	Global Positioning System (GPS)	10	Buah
6.	Lemari Kayu	4	Buah
7.	Kursi Roda/Tangan	18	Buah
8.	LCD-TV	3	Unit
9.	PC/Komputer	36	Unit
10.	Note Book	38	Unit
11.	Printer	61	Buah

12.	AC	14	Buah
13.	Scanner	7	Buah
14.	Kamera	36	Buah
15.	In Focus	9	Buah
16.	Handycam	3	Buah

### **23. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan hasil penetrasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau serta Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, hanya dapat digambarkan melalui kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau khususnya pada Bidang Perumahan dan Permukiman.

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota		416 Desa/Permukiman		58	12	346	30	10	346	51.72	83.33	100.00
2	Tersedianya Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh / Strategis Cepat Tumbuh Perdesaan dan Perkotaan		9 Kawasan		5	1	3	2	1	3	40.00	100.00	100.00

Dilihat dari Indikator pertama, yaitu Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota dengan target pelaksanaan 416 Desa atau permukiman dapat dilaksanakan dengan rasio capaian terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2016. Terdapat penurunan target pada tahun 2015 dikarenakan dampak dari keluarnya peraturan Undang Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, sehingga harus dilaksanakan penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan indikator ini antara lain yaitu peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk mendukung pemenuhan target indikator tersebut.

Indikator yang kedua yaitu Tersedianya Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh / Cepat Tumbuh di Perdesaan dan Perkotaan dengan target 9 Kawasan. Pada tahun 2015 terdapat penurunan target dikarenakan oleh alasan yang sama pada indikator pertama. Adapun keberhasilan capaian target indikator ini salah satunya ialah karena dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kawasan Kumuh. Walaupun demikian dengan keluarnya peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dibatasi yaitu khusus untuk Kawasan Kumuh yang mempunyai luas 10-15 Ha.

Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Urusan Perumahan											
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota	68,307,963,500.00	10,840,000,000.00	68,185,000,000.00	17,870,710,132.00	8,310,748,700.00	27,758,481,000.00	26.16	76.67	40.71	- 0.06	15.64
Tersedianya Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh / Strategis Cepat Tumbuh Perdesaan dan Perkotaan	3,000,000,000.00	500,000,000.00	9,956,249,200.00	1,140,000,000.00	425,874,200.00	8,831,224,900.00	38.00	85.17	88.70	48.57	96.52

Pendanaan pada urusan perumahan diarahkan untuk memenuhi indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk Rasio antara Realisasi dan Anggaran dalam pelayanan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dapat dikatakan kurang baik dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dibawah 20 %. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain yaitu karena keterlambatan pengesahan APBD-Perubahan yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaan kegiatan sehingga anggaran tidak dapat diserap dengan baik. Selain itu, ditambah dengan besarnya substansi pekerjaan dan keterbatasan waktu serta sdm pada bidang perumahan maka ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan sepenuhnya dan akan dibayarkan (hutang) pada tahun anggaran berikutnya. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya untuk pelayanan PSU dapat dilakukan perencanaan yang lebih baik lagi dan pengesahan APBD-Perubahan dapat digesa sehingga permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Selanjutnya untuk pendanaan pelayanan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh/Strategis Cepat Tumbuh Perdesaan dan Perkotaan memiliki persentase rata-rata pertumbuhan yang baik dengan persentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendanaan mencapai 96.52%. Untuk tahun 2016 pendanaan pelayanan relatif kecil dikarenakan terjadinya penyesuaian anggaran dikarenakan dikeluarkannya peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan penanganan Kawasan Kumuh.

Disamping itu, dalam melaksanakan pelayanan di Kawasan Strategis Cepat tumbuh diperlukan pula perencanaan pendanaan yang lebih matang. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Untuk pembangunan kawasan pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak serta kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh rakyat. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan ketergantungan pendanaan pada pemerintah dapat dikurangi.

## 24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebelumnya, serta berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PUPR, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perkimtan Provinsi Riau pada lima tahun mendatang ( *lih.* Subbab 3.2 – 3.4). Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkimtan Provinsi Riau yaitu :

1. Tantangan untuk dapat melayani seluruh penduduk mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat dan sumber daya alam yang terbatas.
2. Perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan *global warming* menjadi tantangan sendiri, terutama untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak, termasuk didalamnya pelayanan prasarana, sarana lingkungan dan utilitas dasar.
3. Perkembangan wilayah yang pesat dan besarnya arus urbanisasi menjadikan wilayah perkotaan menjadi semakin padat.
4. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan untuk melindungi kawasan lindung dan mengontrol pertumbuhan kawasan kumuh dan cepat tumbuh.

Sementara untuk peluang yang dapat ditangkap dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkimtan Provinsi Riau, yaitu :

1. Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman secara swadaya masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi terutama untuk penyediaan rumah yang terjangkau

2. Kerja sama antar daerah atau pemerintahan dalam pengembangan kawasan strategis maupun cepat tumbuh dapat menjadi peluang agar target pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai.
3. Untuk mempercepat perwujudan kondisi yang diinginkan diperlukan pula kerjasama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).
4. Rencana Tata Ruang yang telah disusun dapat menjadi acuan dalam pembangunan, pemanfaatan ruang sesuai RTRW menjadi hal yang mutlak sehingga perkembangan wilayah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 31. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan analisis dari berbagai faktor yang dapat menghambat tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah maka dapat dapat dipetakan beberapa pemersalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
<b>Bidang Perumahan</b>			
1	Tingginya % Penduduk Miskin	1.1 Belum Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni untuk Rumah Tangga Miskin	1.1.1 Keterbatasan penyediaan rumah layak huni untuk rumah tangga miskin oleh Pemerintah Daerah 1.1.2 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni 1.1.3 Kelembagaan Pengelola Rusunawa untuk MBR/Pekerja yang belum terbentuk/berfungsi

2	Masih belum terpenuhinya SPM Urusan Perumahan	2.1 Belum Terpenuhinya capaian SPM Provinsi Urusan Perumahan	2.1.1 Belum tersusunnya Rencana Penyediaan Rumah untuk Korban Bencana
			2.1.2 Belum Tersusunnya Fasilitas Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi
<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>			
3	Masih belum tercapainya kualitas Kawasan Permukiman yang layak huni	3.1 Kawasan Kumuh	3.1.1 Permukiman kumuh yang semakin meluas
			3.1.2 Urbanisasi yang tinggi
			3.1.3 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur
		3.2 Kawasan Strategis	3.2.1 Potensi Kawasan Strategis yang belum dikembangkan dengan sempurna
			3.2.2 Masih kurangnya dukungan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis
		3.3 Kawasan Wilayah Cepat Tumbuh dan Perbatasan	3.3.1 Masih kurangnya dukungan sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antarwilayah permukiman
3.3.2 Belum Tersusunnya strategi pengembangan permukiman dan perencanaan pola pembiayaan pembangunan dengan baik			

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)			
4	Masih Rendahnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman	4.1 Luasnya Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman yang harus dilayani	4.1.1 Belum seluruh masyarakat yang dapat menikmati akses layanan Infrastruktur Permukiman
			4.1.2 Besarnya Jumlah Permukiman yang belum mendapat layanan Infrastruktur Dasar
		4.2 Jangkauan Pelayanan Infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	4.2.1 Masih Belum meratanya cakupan Komponen Prasarana, Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum yang dibangun
			4.2.2 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati hunian yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
Bidang Pertanahan			
5	Masih belum terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pertanahan dengan baik	5.1 Belum tertatanya Layanan Pertanahan	5.1.1 Belum disusunnya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Pemerintah Daerah
			5.1.2 Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan lahan
		5.2 Belum tersedianya <i>data base</i> tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai	5.2.1 Belum teridentifikasinya subyek dan obyek redistribusi tanah.
			5.2.2 Belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat.
5.2.3 Belum terinventarisirnya tanah terlantar			

		5.3 Belum Maksimalnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	5.3.1 Ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW
--	--	---	---

**Bidang Perumahan**, berdasarkan data kepemilikan rumah atau bangunan tempat tinggal di Provinsi Riau berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Kepemilikan Rumah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal			
			Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Menumpang	Lainya
1	Kampar	161.152	136.568	6.244	9.847	8.493
2	Indragiri Hulu	81.842	72.098	2.853	4.522	2.369
3	Bengkalis	107.201	75.947	14.016	12.791	4.447
4	Indragiri Hilir	105.168	94.600	2.861	6.228	1.479
5	Pelalawan	48.711	32.784	5.411	7.132	3.384
6	Rokan Hulu	78.018	65.494	3.885	7.436	1.203
7	Rokan Hilir	77.562	71.424	2.207	3.179	752
8	Siak	67.096	62.227	1.385	2.706	778
9	Kuantan Singingi	64.598	52.127	2.652	7.695	2.124
10	Kepulauan Meranti	43.223	34.597	1.329	5.740	1.557
11	Kota Pekanbaru	147.149	83.304	41.063	14.340	8.442
12	Kota Dumai	47.061	29.473	10.254	5.359	1.975
Provinsi		1.028.781	810.643	94.160	86.975	37.003

Sedangkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Riau Berdasarkan hasil olahan Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015, adalah sebanyak 47.550 Unit rumah dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3  
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni RTLH Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kampar	3.001
2	Indragiri Hulu	5.117
3	Bengkalis	2.980
4	Indragiri Hilir	16.868
5	Pelalawan	3.190
6	Rokan Hulu	3.383
7	Rokan Hilir	4.270
8	Siak	1.618
9	Kuantan Singingi	1.876
10	Kepulauan Meranti	4.463
11	Kota Pekanbaru	383
12	Kota Dumai	401
Total		47.550

Disisi lain, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau relatif masih tinggi, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada Tahun 2016 adalah sebesar 501.590 Jiwa atau sebesar 7,67 % dari jumlah penduduk Provinsi Riau (6.500.971 Jiwa). Setidaknya perlu dibangun sebanyak 30,000 unit rumah layak huni bagi Rumah Tangga Miskin di Provinsi Riau.

Bencana alam terjadi hampir di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun bencana banjir yang memberikan dampak negatif paling besar dan sering terjadi di Provinsi Riau.

Tabel 3.4  
Bencana Alam Banjir dan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Korban  
Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Frek	Korban (Jiwa)		Rumah (Unit)		Bantuan
			Mati	Menderita	Hancur	Rusak	Beras (Kg)
1	Kuantan Singingi	2	-	1.921	-	127	3.800
2	IndragiriHulu	1	-	1.667	-	-	2.000
3	IndragiriHilir	21	2	333	267	-	2.000
4	Pelalawan	1	-	2.221	-	-	5.000
5	Siak	-	-	-	-	-	-
6	Kampar	3	-	4.665	-	-	3.500
7	Rokan Hulu	2	-	3.102	-	-	3.000
8	Bengkalis	10	-	85	85	-	-
9	Kep,Meranti	2	-	438	-	-	2.000
10	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-
11	Pekanbaru	1	-	1.200	-	-	1.000
12	Dumai	1	-	10	7	-	-
Total		44	2	15.642	359	127	22.300

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2015)/

Pada tahun 2012 Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang mengalami frekuensi banjir terbanyak diikuti oleh Kabupaten Bengkalis. Korban menderita terbanyak akibat dari bencana banjir terdapat di Kabupaten Kampar sebesar 4.665 jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebanyak 2.221 jiwa. Jumlah rumah yang hancur akibat bencana alam yang terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis dan wilayah yang tidak terkena musibah banjir pada tahun 2014 adalah Kabupaten Siak dan Rokan Hilir.

**Bidang Kawasan Permukiman**, Provinsi Riau memiliki Kawasan Strategis Provinsi yang ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

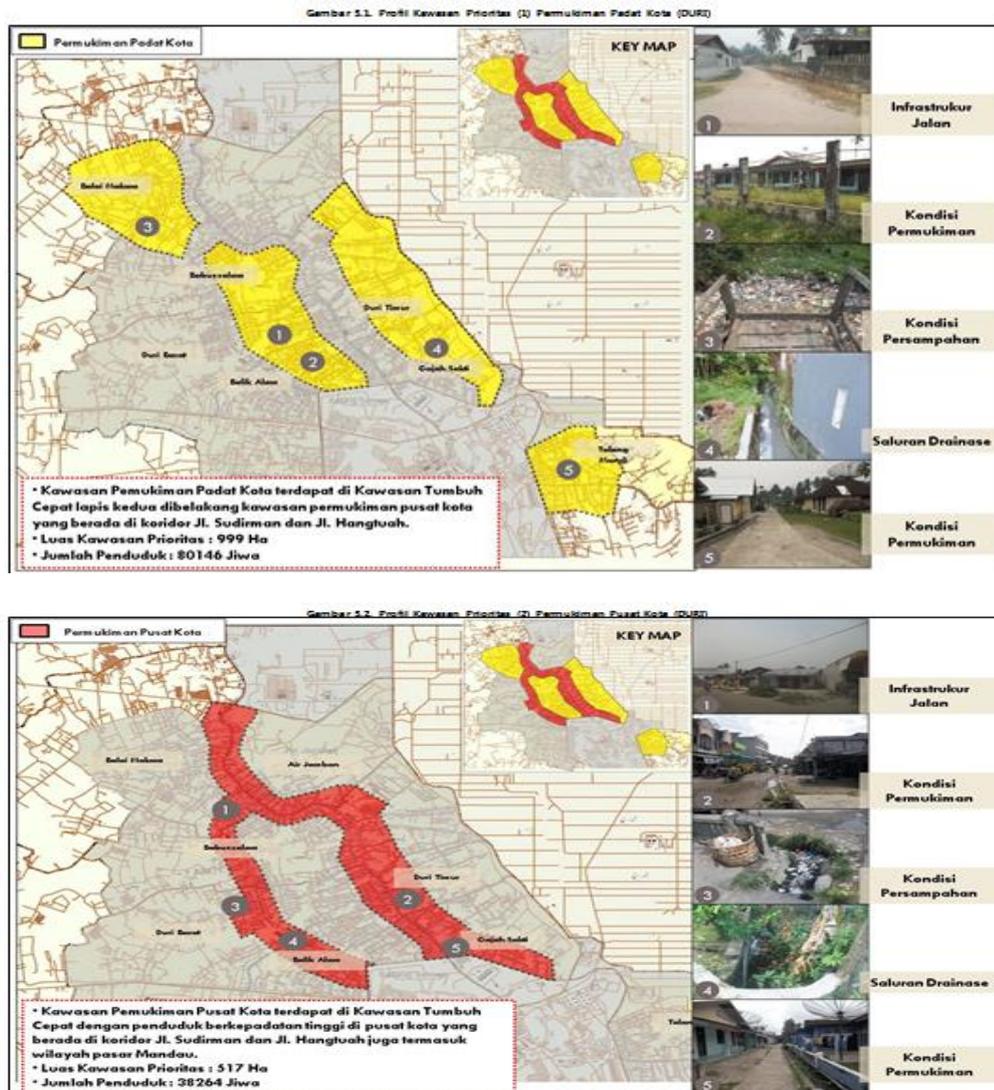
Berdasarkan *Draft* Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau telah ditetapkan Kawasan Strategis Provinsi, antara lain:

### 1. Kawasan Strategis Duri-Dumai-Rupat

Kawasan Strategis Duri merupakan kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Bengkalis, berfungsi sebagai pusat niaga skala regional, pusat pemerintahan khususnya dinas-dinas/SKPD yang melayani kegiatan perkotaan kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri berbasis pertanian/perkebunan dan Kawasan Migas.

Gambar 3.1

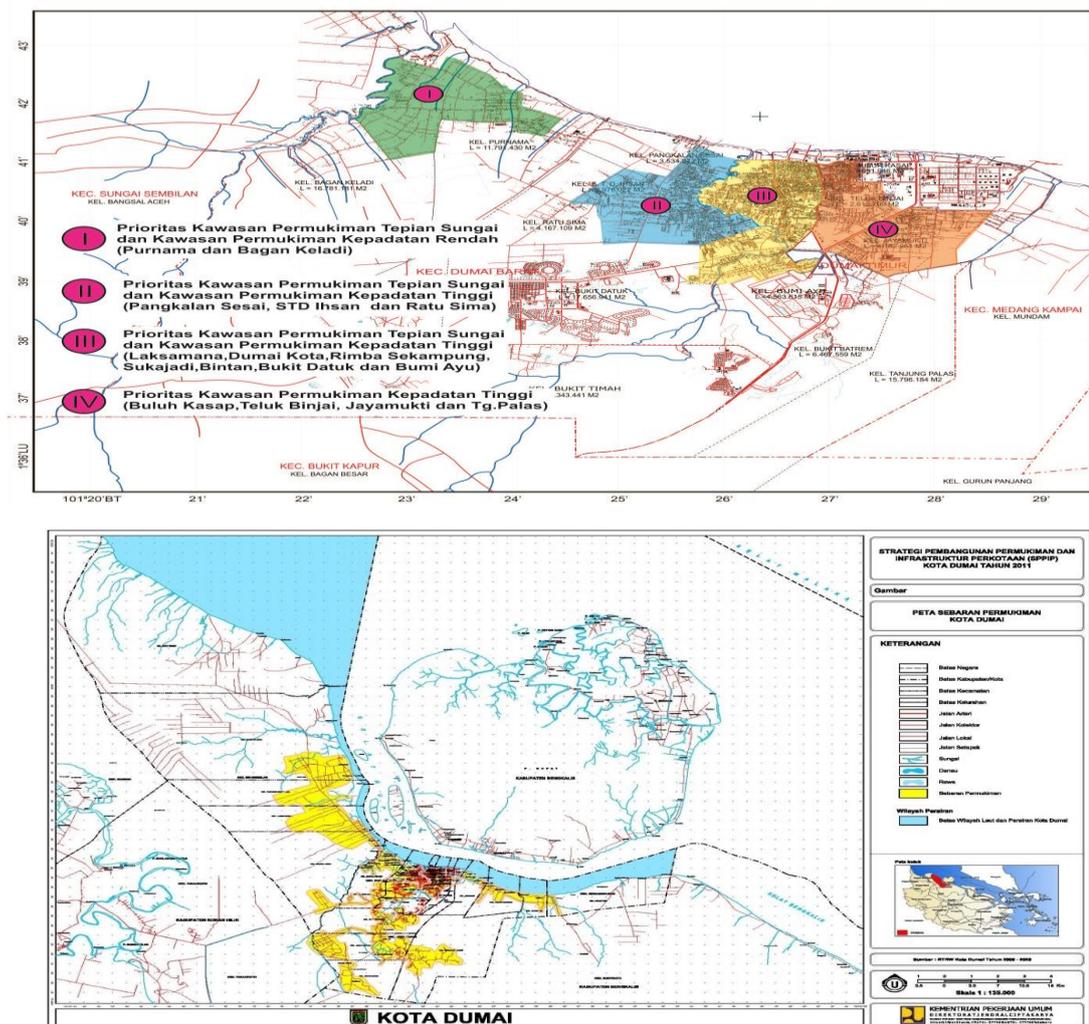
Kawasan Prioritas Permukiman Pusat Kota (Duri)



Sedangkan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Dumai, antara lain:

- a. Kawasan Industri Pelintung (Kecamatan Medang Kampai), Kawasan Industri Lubuk Gaung (Kecamatan Sungai Sembilan).
- b. Kawasan Pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai timur dan Kecamatan Dumai Barat.
- c. Kawasan Minapolitan terletak di Kecamatan Sungai Sembilan.

Gambar 3.2  
Kawasan Prioritas Permukiman Pusat Kota Dumai



Peruntukan kawasan perumahan di Kota Dumai untuk pengembangan kawasan peruntukan perumahan perkotaan, meliputi:

- a. Perumahan perkotaan kepadatan tinggi terletak di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Timur.
- b. Perumahan perkotaan kepadatan sedang terletak di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan.
- c. Perumahan perkotaan kepadatan rendah terletak di Kecamatan Medang Kampai dan Bukit Kapur.

## **2 Kawasan Strategis Selat Panjang**

Kawasan ini memiliki nilai strategis, sebagai pusat niaga dengan skala regional, Pusat pemasaran produk sagu sebagai komoditi unggulan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, wisata kuliner, pusat pendidikan pertanian dan perikanan, Lokasi pengembangan Kawasan Industri berbasis pertanian (sagu) di Kecamatan Tebing Tinggi, pusat pemerintahan kabupaten di Pulau Merbau (Kuala Merbau), permukiman di kawasan perkotaan Alai dan serta pusat produksi pertanian (sagu dan karet). Kawasan strategis Selat Panjang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Upaya pengembangan kawasan strategis Selat Panjang pada masa mendatang perlu didukung oleh beberapa kegiatan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Riau yaitu: pengembangan kegiatan pelabuhan ekspor dengan meningkatkan pelayanan pelabuhan eksisting, pengembangan pelabuhan penumpang internasional di Kawasan Dorak, pengembangan Bandar udara perintis di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, pengembangan sentra-sentra pertanian dan di wilayah *hinterland*-nya (pulau-pulau disekitarnya), dukungan prasarana energi/listrik, air bersih dan telekomunikasi.

Permukiman perkotaan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki karakteristik sebagai kawasan permukiman pesisir dan permukiman wilayah daratan setiap pulau, yaitu kawasan perkotaan Selat panjang, Tanjung Samak, Alai, Teluk Belitung, Tanjung Sari, Peranggas, Tanjung Padang, dan Kuala Merbau.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan permukiman ini, yaitu :

- 1) Mempersiapkan areal perluasan kawasan permukiman.
- 2) Mempertahankan kawasan permukiman perkotaan sebagai kawasan yang berciri perkampungan melayu .
- 3) Melakukan rehabilitasi dan penataan kawasan permukiman pesisir yang terkesan kumuh, melalui upaya merubah orientasi bangunan menghadap keperairan (perairan sebagai halaman rumah).
- 4) Meningkatkan kondisi drainase dan sanitasi lingkungan.
- 5) Melakukan penataan bangunan dan lingkungan.
- 6) Merelokasi bangunan-bangunan yang terletak pada kawasan abrasi.

### **3. PKWp Pulau Burung**

Kawasan Pulau burung adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, pulau ini merupakan pulau yang terpencil sehingga banyak penduduknya yang pindah ke tempat lain yang sudah lebih maju. PKWp Pulau burung memiliki luas wilayah yang paling besar di Kecamatan Pulau Burung yaitu 140,06 Km<sup>2</sup>.

Saat ini PKWp Pulau Burung telah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Indragiri Hilir 2011-2031 menjadi salah satu kawasan strategis Kabupaten Agropolitan Perkebunan dengan karakteristik pengembangan sebagai pusat pertumbuhan utama wilayah kabupaten pelalawan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, industri dan budaya. Dan pengembangan kawasan perkotaan meliputi bagian kawasan perkotaan lama dan bagian kawasan perkotaan baru.

Permasalahan pemukiman di Kecamatan Pulau Burung adalah ketidakteraturan bangunan serta masih banyaknya perumahan penduduk yang termasuk kategori permukiman kumuh. Bangunannya permukiman terbuat dari kayu bahkan ada yang dindingnya juga berasal dari seng. Akan tetapi masih ada beberapa rumah yang sudah dibangun secara permanen namun jumlahnya tidak banyak. Rata-rata rumah tidak memiliki MCK sehat, mereka langsung membuang hajat dan air kotor ke badan air. Kondisi ini sangat banyak ditemui di rumah-rumah yang berada persis di pinggir sungai.

#### 4 Kawasan Pengembangan Pulau Rupa

Kawasan Strategis Rupa (Tanjung Medang), merupakan kawasan cepat tumbuh pada kawasan koridor ekonomi regional yang mengikat perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di pulau Rupa. Kawasan strategis Rupa ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tanjung Medang (Rupa Utara).

Kawasan strategis Tanjung Medang difungsikan sebagai kawasan pariwisata (pantai Tanjung Medang), permukiman perkotaan dan sentra perikanan yang dikembangkan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian dengan pola Kota Terpadu Mandiri.

Adapun Rekapitulasi Kawasan Strategis Provinsi dan permukiman yang ada di dalamnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Rekapitulasi Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Perubahan RPJMD 2014-2019  
Provinsi Riau

No	Kawasan Strategis Provinsi	Luas Permukiman	Jumlah Permukiman
1	Kawasan Strategis Duri-Dumai-Rupa	9.678,82 ha	24
2	Kawasan Selat Panjang dan Sekitarnya	1.679,12 ha	7
3	Kawasan Kuala Enok – Pulau Burung	257,55 ha	1
4	Kawasan Industri Tenayan	2531,32 ha	1
5	Kawasan Kemaritiman	6.255,68 ha	6
6	Kawasan Pengembangan Pulau Rupa	2.392,09 ha	6
7	Kawasan Strategis Budaya Istana Siak Sri	3.128,56 ha	2
8	Kawasan Strategis Pekansikawan	62.045,95 ha	32
Jumlah		87.969,09 ha	79

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

Selain kawasan tersebut di atas, Provinsi Riau juga memiliki kawasan permukiman cepat tumbuh. Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan masyarakat di wilayah Provinsi Riau maka dikhawatirkan penataan kawasan permukiman akan menjadi tidak terkendali.

Tabel 3.6  
Rekapitulasi Kecamatan Pada Kawasan Yang Cepat Tumbuh Dan Berpeluang Menjadi Kawasan Kumuh Perkotaan.

No	Kecamatan	Kawasan	Kriteria
1	Bangkinang Seberang	Kawasan Perkotaan Bangkinang	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi..
2	Tapung	Kawasan Perkotaan Kota Garo	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
3	Lubuk Jambi	Kawasan Perbatasan Provinsi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
4	Sentajo	Kawasan Penopang Kota Taluk Kuantan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
5	Bagan Batu	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
6	Panipahan	Kawasan Perbatasan Negara	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
7	Pinggir	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
8	Sungai Pakning	Kawasan Pelabuhan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
9	Dumai Barat	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
10	Dumai Timur	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
11	Pangkalan Kerinci	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
12	Ujung Batu	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
13	Tambusai Utara	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
14	Tanjung Samak	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
15	Kandis	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
16	Minas	Kawasan Industri	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
17	Kerinci Kanan	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
18	Siberida	Kawasan Perbatasan Provinsi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.
19	Pasir Penyu	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi.

20	RengatBarat	Kawasan Permukiman	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi
21	Kuala Enok	Kawasan Pelabuhan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi
22	Pulau Burung	Kawasan Industri	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 17 Kawasan Kumuh yang merupakan kewenangan provinsi dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Luas total kawasan kumuh yang merupakan kewenangan provinsi (10-15 Ha) sebesar 208 Ha. Rincian Kawasan Kumuh Provinsi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau sebagaimana table 3.1 berikut ini :

Tabel 3.7

Rekapitulasi Identifikasi Kawasan Kumuh Provinsi Riau  
(Kewenangan Provinsi)

No	Kab/Kota	Kec/Kel	Lokasi	Luas Kumuh	No & Tgl SK Kumuh
1	Pekanbaru	LimaPuluh/Rintis	Rintis	11.40 Ha	189 TAHUN 2014 04 APRIL 2014
2	Dumai	Dumai Selatan/Ratu Sima	Ratu Sima	12.52 Ha	237/Bappeda/2014 2 Juni 2014
		Medang Kampai/Pelintung	Pelintung	14.98 Ha	237/Bappeda/2014 2 Juni 2014
		Sungai Sembilang/Bangsai Aceh	Bangsai Aceh	11.46 Ha	237/Bappeda/2014 2 Juni 2014
3	Kampar	Bangkinang Kota/Bangkinang	Bangkinang Kota	13.52 Ha	173 Tahun 2014 10 Oktober 2014
4	Bengkalis	Bengkalis/Rimba Sekampung	Kawasan Perkotaan Bengkalis - Cik Mas Ayu	11.23 Ha	341/KPTS/X/2014 15 Oktober 2014
		Mandau/Batang Serosa	Kawasan Perkotaan Duri Batang Serosa	13.11 Ha	341/KPTS/X/2014 15 Oktober 2014
		RupatUtara/Tanjung Medang	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	11.81 Ha	341/KPTS/X/2014 15 Oktober 2014
5	Kuantan Singingi	KuantanTengah/Sawah Taluk	Sawah Taluk	11.30 Ha	Kpts.421/XI/2014 19 September 2014
6	Siak	Tualang/Perawang	Bawah Pipa Perawang	14.10 Ha	523/HK/KPTS/2014 27 November 2014

			Belakang Pasar Perawang	10.67 Ha	523/HK/KPTS/2014 27 November 2014
7	Inhu	Rengat/Sekip Hulu	Sekip Hulu	12.99 Ha	556 Tahun 2014 30 April 2014
		Rengat/ Kambesko	Pasiran	12.80 Ha	556 Tahun 2014 30 April 2014
8	Inhil	Tembilahan Hulu Tembilahan Hulu	Parit 10	12.97 Ha	Kpts.538/VIII/HK- 2014 29 Agustus 2014
		Tembilahan/ Tembilahan Kota	Parit 11	11.05 Ha	Kpts.538/VIII/HK- 2014 29 Agustus 2014
9	Rokan Hulu	Rambah/ Pematang Berangan	Tulang Gajah	10.22 Ha	Kpts.050.13/BAPPE DA/452/2014 25 September 2014
		Bangun Purba/ Bangun Purba	Dusun I	11.87 Ha	Kpts.050.13/BAPPE DA/452/2014 25 September 2014

**Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak, pada tahun 2020.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan/perdesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

Pada aspek akses air minum, masih diperlukannya peningkatan cakupan layanan yang saat ini secara nasional sekitar 70 persen, penurunan kehilangan air, peningkatan kualitas air minum, optimalisasi potensi pendanaan swasta, penerapan tarif *full*

*costrecovery*, optimalisasi penerapan *Good Corporate Governance*, peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, optimalisasi potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM serta pengembangan teknologi pengolahan air. Sedangkan terkait sanitasi, tantangan/permasalahan antara lain:

- 1) Cakupan layanan sanitasi nasional saat ini masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen;
- 2) Belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia buang air besar sembarangan);
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi berkualitas;
- 4) Perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi;
- 5) Kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan
- 6) Perlunya peningkatan manajemen aset.

**Bidang Pertanahan**, peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya masih bisa dioptimalkan. Sebagai contoh, dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya sarana dan prasarana dasar terkait pembebasan tanah sangat besar, sehingga berpotensi untuk diberdayakan dan ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat daerah.

Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menegaskan bahwa Gubernur melaksanakan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan menempatkan Sekretariat tim pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, khususnya pada Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah di Bidang Pertanahan.

Tahapan perencanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 merupakan kewenangan instansi yang membutuhkan tanah, baik itu instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah

Provinsi Riau, maupun Pemerintah Pusat. Setelah Tahapan perencanaan pengadaan tanah selesai dan dokumen dinyatakan lengkap, maka tahapan persiapan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dengan Sekretaris Tim dijabat oleh Kepala OPD Provinsi Riau yang menjalankan urusan di Bidang Pertanahan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD Provinsi Riau**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah ditetapkan Visi dan Misi Provinsi Riau berikut ini :

***“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemanjapan Aparatur”.***

Sesuai dengan visi Provinsi Riau, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4. Menurunkan Kemiskinan.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan Terpercaya serta Pemanjapan Kehidupan Politik.
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu ,beriman dan bertaqwa.
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata.
9. Meningkatkan Peran swasta dalam Pembangunan.

Telaahan terhadap visi dan misi Gubernur Riau memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, yang ditunjukkan melalui **Misi 4 : Menurunkan Kemiskinan**

Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dianalisis tabel pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada table berikut ini :

Tabel 3.8  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Riau Tahun 2017-2019

No.	Misi Gubernur	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunkan Kemiskinan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah untuk Masyarakat	<p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin</p> <p>Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana, Aparatur Sipil Negara golongan I, II, dan III</p>	<p>Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau pada masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan</p> <p>Implementasi program dan kegiatan yang baru memberi dampak dalam kurun waktu jangka pendek</p> <p>Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan belum maksimal</p> <p>Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai</p>	<p>Dukungan Peraturan dimana Perumahan menjadi urusan wajib sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Tujuan capaian pembangunan perumahan yang selaras dan bersinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota</p> <p>Konsistensi pemangku jabatan dalam upaya pemenuhan sasaran dan indikator capaian program dan kegiatan</p>

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Secara garis besar, beberapa penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Dinas Perkimtan terhadap telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No.	Rencana Strategis K/L	Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
	<p>A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan</p> <p>1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah</p> <p>B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman</p> <p>2. Penyediaan Perumahan</p> <p>3. Pembiayaan Perumahan</p>	<p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota</p> <p>Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota</p> <p>Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi</p> <p>Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin</p> <p>Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana, Aparatur Sipil Negara golongan I, II, dan III</p>	<p>Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah</p> <p>Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap</p> <p>Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal</p> <p>Minimnya infrastruktur pada desa dan perdesaan terisolir</p> <p>Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas</p> <p>Belum mantapnya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan</p> <p>Belum tersedianya data base yang memadai sebagai dasar analisis perencanaan penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan</p>	<p>Dukungan pemerintah kab/kota dalam penetapan Kawasan Strategis Wilayah Cepat Tumbuh yang mempermudah perencanaan Infrastruktur Wilayah yang terpadu</p> <p>Meningkatnya minat dan peran aktif masyarakat (swasta) dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan di kab/kota</p> <p>Perkembangan Rekayasa Teknologi Industri Konstruksi yang pesat dan penemuan metode konstruksi baru yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan</p>

2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional			
	1. Tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata. 2. Tercapainya keadilan dibidang P4T. 3. terselesainya konflik dan sengketa pertanahan. 4. Terwujudnya pengendalian dan pendayagunaan tanah. 5. Tercapainya lembaga pertanahan yang professional.	Memfasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi Riau  Menginventarisasi Tanah Ulayat Provinsi Riau  Mengidentifikasi Sengketa Pertanahan Provinsi Riau  Mengidentifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Se- Provinsi Riau	Keterbatasan pendanaan dalam melaksanakan urusan pertanahan  Minimnya SDM dalam melaksanakan urusan pertanahan baik dari segi jumlah maupun kompetensi	Dukungan dan kerja sama masyarakat yang baik dalam pelaksanaan urusan pertanahan  Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

### **3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visidari Kementerian PUPR 2015-2019 adalah sebagaiberikut :

#### **“Terwujudnya Infrastruktur PUPR Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektifitas daratan dan maritime;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusantujuan yaitu :

**A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan**

**1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah**

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

- 1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan.
- 2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan.

**B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.**

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

- 1) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- 2) Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu:

- 1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat;
- 2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak;
- 3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

2. Penyediaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan.

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi :

- 1) Pengendalian Perumahan Komersial,
  - 2) Penguatan Perumahan Umum,
  - 3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan
  - 4) Fasilitas Perumahan Khusus.
3. Pembiayaan Perumahan

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- 1) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- 2) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program:

- 1) Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan;
- 2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan.

### **3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional**

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visidari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**“Menjadikan Lembaga Pertanahan Untuk Mewujudkan Tanah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2015-2019 adalah :

1. Tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.
2. Tercapainya keadilan dibidang P4T.
3. terselesainya konflik dan sengketa pertanahan.
4. Terwujudnya pengendalian dan pendayagunaan tanah.
5. Tercapainya lembaga pertanahan yang professional.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai “matra ruang” dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam penyusunan RTRWP Riau 2014-2030 disusun berdasarkan potensi dan kondisi yang terdapat dalam wilayah dan masyarakat Provinsi Riau. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karakteristik wilayah, maka dirumuskan kebijakan penataan ruang Provinsi Riau meliputi:

- 1) Pengembangan wilayah secara terpadu dan seimbang melalui penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan pengembangan prasarana wilayah;
- 2) Pemulihan kawasan lindung dan kawasan hutan melalui skenario Riau hijau;
- 3) Penguatan fungsi dan pengembangan kemanfaatan kawasan pesisir dan kelautan; dan
- 4) Pembangunan ekonomi wilayah yang mantap dengan basis ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang dapat menghasilkan nilai tambah.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan system pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sampai akhir kurun RTRWP tahun 2014-2030.

Rencana sistem perkotaan Provinsi Riau dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas: Pusat Kegiatan

Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN).

Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas, meningkatkan pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, dikembangkan struktur system perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau

<b>PKN</b>	<b>PKW</b>	<b>PKWp</b>	<b>PKL</b>
Kota Pekanbaru; Kota Dumai,	Bangkinang; Pasir Pangairan; Bagan Siapi-api; Pangkalan Kerinci; Teluk Kuantan; Bengkalis; Siak Sri Indrapura.	Selat Panjang Kuala Enok Tanjung Buton	Ujung Tanjung; Ujung Batu; Sungai Pakning; Bagan Batu; Duri; Perawang; AirMolek.

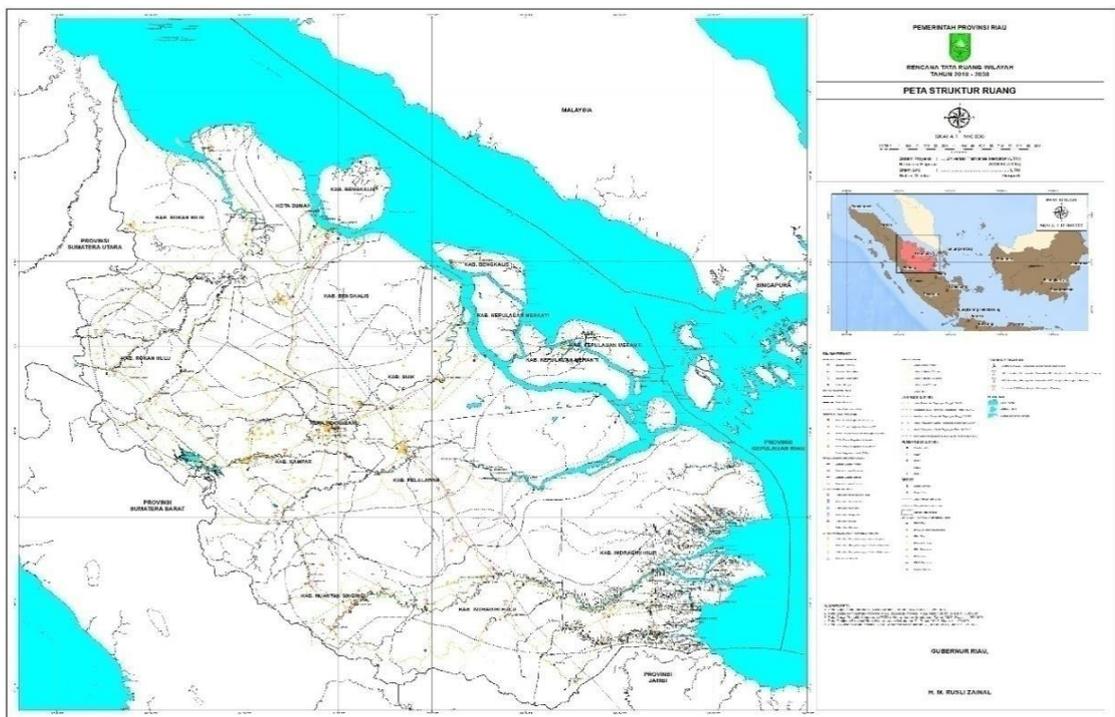
Sumber: Hasil Kajian Tim Penyusunan RTRW Provinsi Riau

Dalam pengembangan wilayah, pusat-pusat permukiman perkotaan secara umum akan berfungsi sebagai simpul koleksi-distribusi dan sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi bagi wilayah hinterlandnya, Sebagai simpul koleksi-distribusi, pada satu sisi akan berperanan sebagai lokasi/tempat pemasaran bagi berbagai produk perekonomian yang dihasilkan wilayah hinterland (fungsi koleksi), sedangkan pada sisi sebaliknya merupakan tempat masuk dan didistribusikannya berbagai produk kawasan perkotaan yang umumnya berupa produk industri ke wilayah hinterland (fungsi distribusi).

Untuk menciptakan arus pergerakan barang dan penumpang yang efisien, efektif dan menerus dari kawasan-kawasan produksi ke lokasi-lokasi pasar di dalam wilayah maupun di luar wilayah (dan sebaliknya) maka penataan hubungan antar pusat-pusat

permukiman perkotaan dan dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah merupakan hal yang sangat penting, penataan hubungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem dan fasilitas kegiatan transportasi secara terpadu inter dan intramoda (darat, laut dan udara) sehingga mampu menghasilkan layanan angkutan yang cepat, aman dan berbiaya murah bagi wilayah, Dengan demikian, transportasi sebagai salah satu unsur biaya dalam produksi diharapkan mampu mendukung upaya penciptaan daya saing bagi produk-produk daerah di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional, utamanya di dalam rangka menyongsong era global sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3.3  
Arahan Struktur Ruang Wilayah Riau Tahun 2014-2030



Sejalan dengan arahan komponen-komponen struktur ruang wilayah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diarahkan kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sebagai berikut:

Tabel 3.11

## Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan Pokok Pengembangan Permukiman Perkotaan di Provinsi Riau	Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>1) Dalam rangka menyongsong era pasar bebas (khususnya AFTA dilingkungan ASEAN), permukiman perkotaan jenjang fungsi PKN dan PKW yang sudah ditetapkan yaitu Pekanbaru, Dumai, Bangkinang, Pasir Pangairan, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat dan Tembilahan perlu terus didorong perkembangannya untuk lebih meningkatkan daya tarik dan daya saing kawasan, sedangkan untuk PKW yang belum berkembang maka upaya pengembangannya perlu dipercepat.</p> <p>2) Memantapkan, memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan fungsi-fungsi utama permukiman perkotaan yang sudah berkembang di semua jenjang fungsi (PKN, PKW, dan PKL), Antara lain sebagai kawasan industri, pusat perdagangan &amp; jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan wisata, pusat alih muat angkutan laut nasional &amp; internasional dll.</p> <p>3) Mengembangkan permukiman perkotaan baru secara terarah, terencana dan terprogram, khususnya perkotaan yang memiliki arti penting dan strategis bagi wilayah (provinsi maupun kabupaten) seperti: Tanjung Buton di Kabupaten Siak, Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis, Tugaudi Kabupaten Pelalawan, dll.</p> <p>4) Mengembangkan permukiman perkotaan ukuran menengah (jenjang fungsi PKL) di sekitar perkotaan Pekanbaru yang diproyeksikan berkembang pesat menjadi "metropolis" berdasarkan konsep "dekonstrerasi planologis", mencakup perkotaan-perkotaan: Minas dan Perawang di Kabupaten Siak, serta Pangkalan Baru, Tambang dan Petapahan di KabupatenKampar.</p>	<p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota</p> <p>Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi</p> <p>Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin</p> <p>Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana, Aparatur Sipil Negara golongan I, II, dan III</p> <p>Menyelenggarakan Infrastruktur Dasar pada Kawasan Permukiman sebagai penunjang Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau</p> <p>Memfasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi Riau</p>	<p>Belum memadainya perangkat peraturan</p> <p>Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan</p> <p>Kurangnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persoalan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan meliputi aspek manajerial, koordinasi, SDM dan pembiayaan</p> <p>Masih banyaknya infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang kurang memadai dalam menunjang aktivitas masyarakat</p> <p>Jaminan Kepastian bermukim ( secure tenure) masih lemah</p> <p>Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan terbatas</p> <p>Laju pertumbuhan permukiman yang tinggi pada wilayah Provinsi Riau</p>	<p>Posisi Lokasi yang strategis yang berada di tengah pulau sumatera dan jalur pelayaran internasional Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dan industri hasil olahan sektor perkebunan dan kehutanan serta hasil galian minyak bumi dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.</p> <p>Potensi-Potensi yang dimiliki setiap Kawasan yang dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan fasilitas penunjang infrastruktur permukiman disetiap kawasan tersebut</p> <p>Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dengan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa</p>

<p>5) Melaksanakan peningkatan pengembangan dan/atau pembangunan baru fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara secara terarah, terencana dan terprogram pada semua jenjang fungsi untuk menunjang permukiman perkotaan utama (PKN, PKW dan PKL) yang telah direncanakan, seperti: pengembangan Bandara Pinang Kampai (Pusat Penyebaran Sekunder) di Kota Dumai, Pelabuhan Tanjung Buton (Pelabuhan Internasional) di Kabupaten Siak dll.</p> <p>6) Meningkatkan pengembangan dan atau pembangunan baru prasarana dan sarana jaringan jalan, serta fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan untuk meningkatkan interkasi ruang dan ekonomi antar pusat-pusat permukiman perkotaan, Antara pusat permukiman perkotaan dengan kawasan-kawasan produksi (wilayah hinteland), dan antara pusat-pusat permukiman perkotaan dan kawasan-kawasan produksi dengan outlet-outlet utama kegiatan transportasi wilayah (Pelabuhan Laut utama dan Bandara Pusat Penyebaran).</p>			
--	--	--	--

Selain itu, upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu antar lintas sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan seperti 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA *Open Dumping* yang menghasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi.

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Provinsi Riau perlu dilakukan dan diterapkan dalam kebijakan dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau dengan tujuan untuk penyiapan rencana-rencana umum dan studi kelayakan pengembangan berbagai prasarana sarana dan utilitas dasar wilayah sebagai persiapan awal pelaksanaan pembangunan fisik, dan sebagai wahana koordinasi di antara pembina prasarana dan sarana.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin.
- 2) Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memenuhi persyaratan yang memadai.
- 3) Belum tertatanya Kawasan Permukiman yang berimbang dan berkelanjutan.
- 4) Rendahnya kualitas infrastruktur dasar Kawasan Permukiman Kumuh.
- 5) Kualitas dan keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai.
- 6) Belum adanya kepastian dan keberlanjutan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 7) Belum optimalnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
- 8) Tumpang tindih kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, berdasarkan ruang lingkup yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada tahun Ke-		
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	17,81%	19,82%	22,03%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi	10%	20%	30%

		Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	198 Ha	173 Ha	143 Ha
3.	Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan	PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan	30.500 Meter	37.000 Meter	40.500 Meter
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Persentase rentang waktu pelaksanaan Tata Kelola Sumber daya Perangkat Daerah	100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2019. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur.			
Misi I : Meningkatkan Pembangunan Infarstruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi
	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh	Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh Yang Menjadi Kewenangan

			Provinsi
Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan	Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman	Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman Perkotaan di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Riau
Misi II : Menurunkan Kemiskinan			
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin	Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat
Misi III : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum	Percepatan Pelayanan Dalam Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Pemantapan Tata Kelola dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Penguatan Kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan aparatur.

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan Kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau disusun berdasarkan urusan *konkuren* dan urusan pilihan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta menetapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau disajikan pada Tabel 6.1 sebagaimana terdapat pada lampiran.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019. Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau 2017-2019 dirumuskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin	16%	17.81%	19.82%	22.03%	22.03%
2	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi		10%	20%	30%	30%
3	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	208 Ha	198 Ha	173 Ha	143 Ha	143 Ha
4	PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan		30.500 m	37.000 m	40.500 m	108.000 m
5	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi		3 Dok	3 Dok	3 Dok	9 Dok

6	Persentase rentang waktu pelaksanaan Tata Kelola Sumber daya Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%
---	---	--	------	------	------	------

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang merupakan rangkaian rencana dari urusan, sub urusan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut dengan program kegiatan yang ada di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta target kinerja yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau.

Rencana Strategis memuat visi dan misi yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan sasaran, kebijakan dan program kerja untuk dilaksanakan agar mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun pelaksanaan ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berikut dengan implementasi pelaksanaan sesuai dengan RPJPD Provinsi Riau dan dituangkan kedalam program kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau selama 2 (Tiga) tahun mendatang.

Untuk urusan dan sub urusan, program kerja kegiatan yang belum ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau, maka patut kiranya diberikan solusi melalui sinkronisasi Program Kegiatan atau Persamaan Kegiatan di dalam merencanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta jabatan yang telah dilantik dengan output pelaksanaan menjadi penilaian bagi setiap aparatur yang menjabat di jabatan pada Perangkat Daerah baru tersebut. Oleh karena permasalahan urusan dan kewenangan yang dialami oleh sebahagian pejabat, maka perlu dilakukan penetapan kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar semua komponen dan target kinerja individu serta organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
							207,028		292,135		150,875		2,514,777						
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah		<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik		90	10,040	100	2,657	100	2,657	100	15,353	Dinas PKPP Provinsi Riau					
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik				12 Bulan	1,020	12 Bulan	1,020	24 Bulan	2,040						
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12 Bulan	331	12 Bulan	350	24 Bulan	681						
			3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	384	12 Bulan	163	12 Bulan	200	36 Bulan	747						
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	164	12 Bulan	112	12 Bulan	150	36 Bulan	426						
			5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik				12 Bulan	48	12 Bulan	100	24 Bulan	148						
			6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Komputer, 1 Proyektor, 5 Printer, 2 Kamera, 2 GPS	200		1,312	285 Unit	1,512						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Rentang waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan		12 Bulan	55		12 Bulan	55	24 Bulan	110						
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		2740 Porsi	110	3180 Porsi	79	5300 Porsi	100	11220 Porsi	289					
			9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti		39 Kali	660	32 Kali	361	50 Kali	712	121 Kali	1,734					
			10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor				7 Orang	206	7 Orang	202	14 Orang	407					
			11	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD		12 Bulan	100			12 Bulan	80	24 Bulan	180					
			12	Penyediaan Profil SKPD	Jenis Profil SKPD yang disediakan		1 Kegiatan	107					1 Kegiatan	107					
			13	Pameran Pembangunan (Riau Expo)	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti				1 Pameran	97	1 Pameran	50	2 Pameran	147					
				<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang Sesuai dengan Standar Kerja		<b>88</b>	<b>1,555</b>	<b>100</b>	<b>506</b>	<b>100</b>	<b>430</b>	<b>100</b>	<b>2,492</b>					
				<b>Kegiatan :</b>															
			1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Kantor yang Dipelihara		13 Unit	411	11 Unit Roda Empat 10 Unit Roda Dua	306	15 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	450	15 Unit Mobil dan 10 Unit Motor	1,168					
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang di Rehab						750 M <sup>2</sup>	1,000	750 M <sup>2</sup>	1,000					
			3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Rentang waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	53			12 Bulan	100	24 Bulan	153					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			4 Penyediaan Sarana Kearsipan	Jumlah Sarana Kearsipan Yang disediakan						Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit, Filling Kabinet 2 unit, Lemari Besi 2 Unit	40	Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit, Filling Kabinet 2 unit, Lemari Besi 2 Unit	40				
			<b>PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Meningkatnya Kualitas dan Disiplin Aparatur		96	1,210	100	58	100	49	100	1,316				
			<b>Kegiatan :</b>														
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		740 Stel	508					740 Stel	508				
			2 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang waktu Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur		12 Bulan	110	12 Bulan	58	12 Bulan	100	36 Bulan	268				
			<b>PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur negara		93	525			100	571	100	1,096				
			<b>Kegiatan :</b>														
			1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal						20 Orang	250	20 Orang	250				
			2 Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Sistem E-Monitoring	Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui Sistem E-Monitoring		1 Laporan	150					1 Laporan	150				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			<b>PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase ketepatan penyampaian laporan		94	1,148	100	489	100	416	100	2,053						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun , Jumlah Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur yang disediakan		1 Dokumen	33			2 Orang	280	1 Dokumen , 2 Orang	313						
			2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah dokumen LAKIP Dinas PKPP Prov Riau yang disusun		1 Dokumen	85					1 Dokumen	85						
			3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja SKPD		1 Dokumen	55			1 Dokumen	50	2 Dokumen	105						
			4 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun		2 Dokumen	347	1 Dokumen	237	1 Dokumen	250	4 Dokumen	834						
			5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD yang disusun		1 Dokumen	235	1 Dokumen	223	1 Dokumen	314	3 Dokumen	772						
			6 Pendataan barang milik daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan Inventaris Barang Milik Daerah		1 Dokumen	162			1 Dokumen	170	2 Dokumen	332						
			7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang Disusun						1 Dokumen	50	1 Dokumen	50						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			<b>PROGRAM : PENINGKATAN FASILITAS PENDUKUNG FUNGSI KE-PU-AN</b>	Persentase peningkatan perangkat pendukung teknis ke PU -an		100	900					100	900						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengendalian yang Disusun															
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>	Persentase ketersediaan data/informasi		1 Pameran	150					1 Pameran	150						
			<b>Kegiatan</b>																
			1 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Jumlah Pameran Pembangunan Yang Diikuti		1 Pameran	150					1 Pameran	150						
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan		2 Penyelesaian Konflik Pertanahan	Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Se-Provinsi Riau						1 Dokumen	323	1 Dokumen	323						
			<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH</b>	Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						100	393	100	393						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum di Provinsi Riau						5 Lokasi	393	5 Lokasi	393						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			<b>PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN</b>	Persentase Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan						100	607	100	607						
			<b>Kegiatan</b>																
			1 Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah se-Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah se-Provinsi						1 Dokumen	140	1 Dokumen	140						
			2 Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-						1 Dokumen	291	1 Dokumen	291						
			3 Sosialisasi Hukum Pertanahan se-Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan yang Diselenggarakan						1 Kegiatan	176	1 Kegiatan	176						
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	Jumlah Kawasan Strategis yang Ditingkatkan Infrastrukturnya (Kawasan)		1 Kawasan	10,150	4 Kawasan	48,226	1 Kawasan	11,249	6 Kawasan	69,625						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi Riau Yang Disusun				3 Dokumen	1,034	3 Dokumen	1,532	6 Dokumen	2,566						
			2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Duri-Dumai-Rupat	Jumlah Kawasan Strategis Duri-Dumai-Rupat Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya				1 Kawasan	27,032	1 Kawasan	30,000	2 Kawasan	57,032						
			3 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Selat Panjang	Jumlah Kawasan Strategis Selat Panjang Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya				1 Kawasan	2,746	1 Kawasan	3,500	2 Kawasan	6,246						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			4 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Kuala Enok – Pulau Burung	Jumlah Kawasan Strategis Kuala Enok - Pulau Burung Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	4,500	1 Kawasan	4,500				
			5 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Kawasan Industri Tenayan	Jumlah Kawasan Strategis Kawasan Industri Tenayan Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	4,500	1 Kawasan	4,500				
			6 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Kawasan Kemaritiman	Jumlah Kawasan Strategis Kawasan Kemaritiman Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	4,500	1 Kawasan	4,500				
			7 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Rupat	Jumlah Kawasan Strategis Pulau Rupat Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya				1 Kawasan	3,763			1 Kawasan	3,763				
			8 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Kawasan Strategis Budaya Istana Siak Sri Indrapura	Jumlah Kawasan Strategis Kawasan Budaya Istana Siak Sri Indrapura Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	4,500	1 Kawasan	4,500				
			9 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Kawasan Strategis Pekansikawan	Jumlah Kawasan Strategis Pekansikawan Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	4,500	1 Kawasan	4,500				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			10 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi di Rupa Utara	Jumlah Kawasan Strategis Rupa Utara Yang Dibangun/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya						1 Kawasan	5,417	1 Kawasan	5,417						
			11 Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum	Jumlah Lokasi Yang Ditetapkan Provinsi Riau				3 Lokasi	799			3 Lokasi	799						
			12 Perencanaan dan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan Kepentingan Umum di Provinsi Riau						1 Dokumen	299	1 Dokumen	299						
			12 Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau (Kewenangan Prov)	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kualitas PSU Lingkungannya		7 Kawasan	4,594					7 Kawasan	4,594						
			13 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kawasan Cepat Tumbuh di Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Kampar yang dibangun/ditingkatkan Infrastruktur Permukimannya				1 Kawasan	973			1 Kawasan	973						
			14 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau Tahun 2016		1 Kegiatan	386					1 Kegiatan	386						
			15 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016		1 Kegiatan	80					1 Kegiatan	80						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			16	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkalis Tahun 2016		1 Kegiatan	677				1 Kegiatan	677						
			17	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kota Pekanbaru Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kota Pekanbaru Tahun 2016		1 Kegiatan	14,440				1 Kegiatan	14,440						
			18	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Dumai Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Dumai Tahun 2016		1 Kegiatan	694				1 Kegiatan	694						
			19	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016		1 Kegiatan	14,688				1 Kegiatan	14,688						
			21	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016		1 Kegiatan	4,206				1 Kegiatan	4,206						
			22	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir		1 Kegiatan	2,915				1 Kegiatan	2,915						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			23	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016		1 Kegiatan	1,750				1 Kegiatan	1,750						
			24	Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2016		1 Kegiatan	264				1 Kegiatan	264						
	Menurunkan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi		25	Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau yang disusun			4 Dokumen	698	5 Dokumen	1,081	9 Dokumen	1,780						
			26	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Ditata/Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya					7 kawasan	10,446	7 kawasan	10,446						
			27	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kota Dumai	Jumlah Kawasan Kumuh di Dumai Yang Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya			1 Kawasan	3,769	1 kawasan	4,500	2 Kawasan	8,269						
			28	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak Yang Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya			1 Kawasan	1,972	1 kawasan	3,500	2 Kawasan	5,472						
			29	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkalis Yang Ditingkatkan Kualitas Infrastruktur Permukimannya			1 Kawasan	1,982	1 kawasan	3,500	2 Kawasan	5,482						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			30 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Kampar Yang Ditingkatkan Kualitas Infrastrukturnya				1 Kawasan	1,754	1 kawasan	3,500	2 Kawasan	5,254						
Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN</b>	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Pedesaan (m)		40000 M	20,000					40000 M	20,000						
			<b>Kegiatan</b>																
			1	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Kampar (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kampar (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		13005 M	15,253						13005 M	15,253				
			2	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Kuantan Singingi (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuantan Singingi (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		4376 M	6,081						4376 M	6,081				
			3	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Indragiri Hulu (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Indragiri Hulu (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		7108 M	8,905						7108 M	8,905				
			4	Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		33295 M	34,957						33295 M	34,957				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			5 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Pelalawan (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pelalawan (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		5881 M	8,430					5881 M	8,430						
			6 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Siak (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Siak (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		1743 M	2,195					1743 M	2,195						
			7 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Kepulauan Meranti (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Meranti (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		1824 M	2,622					1824 M	2,622						
			8 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Bengkalis (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bengkalis (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		5070 M	10,304					5070 M	10,304						
			9 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Rokan Hilir (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rokan Hilir (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		600 M	882					600 M	882						
			10 Peningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Rokan Hulu (Kewenangan Prov)	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kabupaten Rokan Hulu (Kewenangan Prov) yang dibangun/ditingkatkan (m)		4122 M	5,281					4122 M	5,281						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			11 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014		1 Kegiatan	41					1 Kegiatan	41						
			12 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014		1 Kegiatan	48					1 Kegiatan	48						
			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</b>	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Perkotaan (m')		<b>35000 M</b>	<b>18,000</b>	<b>37000 M</b>	<b>125,644</b>	<b>40500 M</b>	<b>19,948</b>	<b>112500 M</b>	<b>163,592</b>						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1 Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Kab/Kota				12 Dokumen	1,433	12 Dokumen	2,200	22 Dokumen	3,633						
			2 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Pekanbaru	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Pekanbaru Yang Dibangun/Ditingkatkan				12500 M	5,000	757 M	1,100	13257 M	6,100						
			3 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kota Dumai	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Dumai Yang Dibangun/Ditingkatkan				4530 M	5,000	703 M	1,100	5233 M	6,100						
			4 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Yang Dibangun/Ditingkatkan				16456 M	17,839	702 M	1,100	17158 M	18,939						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			5	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Dibangun/Ditingkatkan			1300 M	1,476	601 M	1,100	1901 M	2,576						
			6	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Bengkalis	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Bengkalis Yang Dibangun/Ditingkatkan			7336 M	8,040	602 M	1,100	7938 M	9,140						
			7	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Siak	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Siak Yang Dibangun/Ditingkatkan			5500 M	6,022	705 M	1,100	6205 M	7,122						
			8	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Pelalawan	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Pelalawan Yang Dibangun/Ditingkatkan			3200 M	3,600	705 M	1,100	3905 M	4,700						
			9	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Yang Dibangun/Ditingkatkan			1600 M	1,766	704 M	1,100	2304 M	2,866						
			10	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Yang Dibangun/Ditingkatkan			1000 M	1,200	702 M	1,100	1702 M	2,300						
			11	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Yang Dibangun/Ditingkatkan			15725 M	17,100	624 M	1,100	16349 M	18,200						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			12	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Kampar	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Kampar Yang Dibangun/Ditingkatkan			650 M	771	705 M	1,100	1355 M	1,871						
			13	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kabupaten Rokan Hulu Yang Dibangun/Ditingkatkan			5255 M	5,875	702 M	1,100	5957 M	6,975						
			15	Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi PSU Permukiman Provinsi Riau			1 Dokumen	217	1 Dokumen	200	2 Dokumen	417						
			16	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kota Pekanbaru	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Pekanbaru yang Dibangun/Ditingkatkan		25365 M		32,168			25365 M	32,168						
			17	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kota Dumai	Panjang Jalan Lingkungan di Permukiman Kota Dumai yang Dibangun/Ditingkatkan		3794 M		4,187			3794 M	4,187						
			18	Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja Provinsi Riau yang dikelola		1 Rusunawa		7,013			1 Rusunawa	7,013						
			19	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau	Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan Kualitas Infrastrukturnya		2 Kawasan		5,025			2 Kawasan	5,025						
			20	Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau		1 Kegiatan		15			1 Kegiatan	15						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Jumlah Sarana Perumahan Kawasan Permukiman Strategis yang Diadakan		2000 unit	143,000	2151 Unit	114,555	2200 Unit	114,555	6351 Unit	372,111						
			<b>Kegiatan</b>																
			1	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni yang Dibangun		2001 Unit	100,080						2001 Unit	100,080				
			2	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 1 yang Dibangun				545 Unit	29,992	500 Unit	27,500		1045 Unit	57,492				
			3	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 2 yang Dibangun				500 Unit	28,750	500 Unit	28,750		1000 Unit	57,500				
			4	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 3 yang Dibangun				516 Unit	31,000	500 Unit	30,000		1016 Unit	61,000				
			5	Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4	Jumlah Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Wilayah 4 yang Dibangun				500 Unit	30,000	500 Unit	30,000		1000 Unit	60,000				
			6	Manajemen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau		1 Dokumen	3,569,100						1 Dokumen	3,569,100				
			7	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 1	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 1				1 Dokumen	789	1 Dokumen	800		2 Dokumen	1,589				
			8	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 2	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 2				1 Dokumen	837	1 Dokumen	900		2 Dokumen	1,737				
	9	Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 3	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 3				1 Dokumen	929	1 Dokumen	950		2 Dokumen	1,879						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			10 Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Humi (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 4	Jumlah Laporan Manajemen Rumah Sehat Layak Humi (RSLH) Provinsi Riau Wilayah 4				1 Dokumen	895	1 Dokumen	950	2 Dokumen	1,845						
			11 Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Humi (RSLH) Provinsi Riau	Jumlah Laporan Pendataan dan Verifikasi Rumah Sehat Layak Humi (RSLH) Provinsi Riau		1 Dokumen	1,382	1 Dokumen	1,273	1 Dokumen	1,193	3 Dokumen	3,848						
			12 Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi	Jumlah relokasi dan rumah yang dibangun akibat bencana provinsi.				200 unit	14,000	200 unit	14,000	400 unit	28,000						
			13 Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi	Jumlah Dokumen Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi						1 Dokumen	1,000	1 Dokumen	1,000						
			14 Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Inventarisasi Lahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi						1 Dokumen	1,000	1 Dokumen	1,000						
			15 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen RP3KP Provinsi Riau yang disusun						1 Dokumen	2,430	1 Dokumen	2,430						
			16 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Rusunawa Pekerja yang dibangun		2 Unit Bangunan Gedung	4,133					2 Unit Bangunan Gedung	4,133						
			17 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Jumlah Rusunawa Pekerja Provinsi Riau yang dikelola				1 Rusunawa	3,363	1 Rusunawa	1,107	2 Rusunawa	3,363						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		Target	Rp (juta)			Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			18	Pembayaran Hutang Kegiatan Pengadaan Infrastruktur Rusunawa Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Pengadaan Infrastruktur Rusunawa Tahun 2016		1 Kegiatan	347				1 Kegiatan	347						
			<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>		Jumlah Dokumen Lingkungan Sehat Perumahan (Dokumen)		<b>1 Dokumen</b>	<b>350</b>				<b>1 Dokumen</b>	<b>350</b>						
			<b>Kegiatan :</b>																
			1	Survey dan Perencanaan Program Bidang Permukiman dan Perumahan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Survey dan Perencanaan Yang Disediakan		1 Dokumen	290				1 Dokumen	290						
			2	Pembayaran Hutang Kegiatan Survey Dan Perencanaan Program Bidang Permukiman Dan Perumahan Provinsi Riau Tahun 2016	Terlaksananya Pembayaran Hutang Kegiatan Survey Dan Perencanaan Program Bidang Permukiman Dan Perumahan Provinsi Riau Tahun 2016		1 Kegiatan	50				1 Dokumen	50						